



**IMPLEMENTASI TINDAKAN AFIRMASI
DALAM PEMENUHAN HAK REPRODUKSI MENYUSUI
WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LPP KELAS IIA SEMARANG**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

AZKIYA NUR KHARIZA

11000120120156

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI TINDAKAN AFIRMASI
DALAM PEMENUHAN HAK REPRODUKSI MENYUSUI
WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LPP KELAS IIA SEMARANG**

JURNAL HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

AZKIYA NUR KHARIZA

11000120120156

Jurnal hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

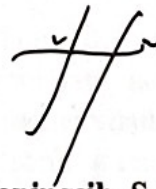
Dosen Pembimbing I,



Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.

NIP. 196208211987032002

Dosen Pembimbing II,



Dyah Wijaningsih, S.H., M.H.

NIP. 196801291994022001

HALAMAN PENGUJIAN

**IMPLEMENTASI TINDAKAN AFIRMASI
DALAM PEMENUHAN HAK REPRODUKSI MENYUSUI
WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LPP KELAS IIA SEMARANG**

Disiapkan dan disusun
Oleh:

Azkiya Nur Khariza
NIM 11000120120156

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji
Ketua Penguji

Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196208211987032002

Anggota Penguji I

Dyah Wijaningsih, S.H., M.H.
NIP. 196801291994022001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Universitas Diponegoro

Anggota Penguji II

Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H.
NIP. H.7.199101062021021001

Mengetahui:
Kepala Program Studi S1 Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 8 Agustus 2024

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the text 'SATU DUA RUPAH' vertically on the left, '10000' in large red numerals in the center, and 'METERAI TEMPEL' on the right. At the bottom of the stamp, the alphanumeric code '2F7F6ALX323383165' is visible.

Azkiya Nur Khariza

NIM 11000120120156

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Honeste Vivere, Alterum non Laedere, Suum Cuique Tribuere”

-Live Honorably, Harm No One, Give Each Their Due-

Domitius Annianus Ulpianus (223 AD)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Dosen Pembimbing Penulis, yaitu Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H.,
M.Hum. dan Dyah Wijaningsih, S.H., M.H.;
3. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang;
4. Kedua orang tua dan seluruh keluarga penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Implementasi Tindakan Afirmasi dalam Pemenuhan Hak Reproduksi Menyusui Warga Binaan Perempuan di LPP Kelas IIA Semarang”**. Penulisan hukum ini akan membahas tentang penerapan kebijakan afirmasi dalam pemenuhan hak menyusui bagi warga binaan perempuan di LPP Kelas IIA Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Tak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Ketua Bagian Bidang Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Hukum dan Masyarakat;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan bagian Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Hukum;
6. Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas seluruh arahan dan bimbingan yang senantiasa diberikan kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir;
7. Ibu Dyah Wijaningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan arahan, bimbingan dan dukungan emosional bagi penulis dalam menghadapi kesulitan saat penulisan tugas akhir;
8. Bapak Sukinta S.H, M.Hum, selaku Dosen Wali Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Ibu dan Bapak Dosen Pengajar serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
10. Seluruh elemen dan informan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang telah membantu penelitian penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir;
11. Kedua orang tua penulis Drs. H. Rifai dan Almh. Rina Wadiati Suwardi yang senantiasa mendoakan keberhasilan penulis. Selalu mendukung dan menghargai proses penulis selama mengerjakan tugas akhir ini. Walaupun Umi sudah berpulang terlebih dahulu namun pengajarannya masih terpatut dibenak penulis agar menjadi insan yang selalu membantu orang lain dan berbuat baik kepada sesama;
12. Kedua saudari penulis Gloria Putri Pancarrani dan Siti Annisa Rahmawati yang selalu ada disaat penulis gundah dalam kebingungan. Selalu

memberikan dukungan tatkala penulis berpikiran untuk menyerah. Bersama kalianlah penulis memahami arti kehidupan;

13. Raditya Rafif Isaard yang penulis cintai, yang selalu memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis. Selalu sabar menghadapi dan membersamai penulis selama proses penulisan tugas akhir. Semoga semua doa selalu menyertai dalam setiap langkah kita;

14. Keluarga kecil Himpunan Mahasiswa Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Hukum dan Masyarakat (Himadashuma), Adel, Qila, Kak Sabil, Kak Angga, dan seluruh anggota yang berharga bagi penulis serta hususnya kepada Naufal yang selalu melihat kebelakang bagi penulis yang masih tertinggal, selalu ada ketika penulis kesulitan menyelesaikan tugas akhir;

15. Keluarga kerja Folkafe Setiabudi, Mbak Dini, Kak Tessa, Kak Inez, Mas Muamar, Mas Bima, Mas Aldo, serta seluruh teman-teman kitchen, bar dan core Folkafe. Bersama kalianlah penulis memahami arti kerja sama dan tanggung jawab;

16. Seluruh nama yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga segala doa baik akan kembali dalam kebaikan.

Semoga ilmu-ilmu yang penulis dapatkan akan berlanjut dan bermanfaat bagi sesama sepanjang hidup. Penulis harap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam pengembangan kajian gender serta hukum dan masyarakat.

Semarang, 3 Agustus 2024

Azkiya Nur Khariza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Kerangka Pemikiran	13
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	14
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Metode Pendekatan	16
1.6.2 Spesifikasi Penelitian	17
1.6.3 Jenis Data	17
1.6.4 Metode Pengumpulan Data	18
1.6.5 Metode Analisis Data	21

1.7	Sistematika Penulisan.....	22
1.8	Orisinalitas	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		26
2.1	Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	26
2.2	Tinjauan Umum Tentang Hak Reproduksi Menyusui	30
2.3	Tinjauan Umum Tentang Afirmasi	34
2.4	Tinjauan Umum tentang Politik Hukum.....	38
2.5	Tinjauan Umum tentang Feminist Legal Theory	41
2.6	Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang	44
BAB III PEMBAHASAN.....		47
3.1	Politik Hukum dalam Afirmasi Pemenuhan Hak Reproduksi Menyusui bagi Warga Binaan Perempuan.....	47
3.1.1	Politik Hukum dan Kesetaraan Gender	47
3.1.1.1	Politik Hukum di Indonesia	46
3.1.1.2	Politik Hukum dan Feminisme Era Orde Baru	52
3.1.2	Konsep Feminist Legal Theory dalam Afirmasi sebagai Upaya Pemenuhan Hak Reproduksi Warga Binaan Perempuan.....	62
3.1.2.1	Hak Reproduksi Menyusui adalah Hak Perempuan Secara Kodrati	60
3.1.2.2	Perempuan dalam Sistem Pemidanaan yang Bergender.....	63

3.2 Implementasi Tindakan Afirmasi dalam Pemenuhan Hak Reproduksi Menyusui bagi Warga Binaan Perempuan di LPP Kelas IIA Semarang	76
3.2.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.....	76
3.2.2 Mekanisme Pelaksanaan Tindakan Afirmasi bagi Warga Binaan Perempuan Menyusui di LPP Kelas IIA Semarang	78
3.2.2.1 Tindakan Afirmasi dalam Kesetaraan Hak bagi Warga Binaan.....	75
3.2.2.2 Tindakan Afirmasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.....	78
3.3 Kendala dan Upaya terkait Pemenuhan Hak Reproduksi Menyusui bagi Warga Binaan Perempuan di LPP Kelas IIA Semarang	94
3.3.1 Kendala Pemenuhan Hak Reproduksi Menyusui Bagi Warga Binaan Perempuan di LPP Kelas IIA Semarang	94
3.3.2 Upaya Pemenuhan Hak Reproduksi Menyusui Melalui Tindakan Afirmatif	98
BAB IV PENUTUP.....	105
4.1 Kesimpulan.....	105
4.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	112

ABSTRAK

Pemenuhan Hak Reproduksi di Indonesia dipengaruhi dengan erat oleh budaya Patriarki, sehingga pembentukan hukum yang mengaturnya hanya didasarkan pada *viewpoint* laki-laki tanpa memperhitungkan perspektif perempuan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan masih belum sepenuhnya mengakomodir Tindakan Afirmasi bagi warga binaan perempuan dalam fungsi reproduksinya. Hak reproduksi menyusui bagi warga binaan perempuan belum secara optimal dipenuhi dan tidak memiliki mekanisme khusus dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Permasalahan yang dapat ditemui adalah (1) bagaimana politik hukum tentang afirmasi dalam pemenuhan hak reproduksi menyusui bagi warga binaan perempuan; (2) bagaimana implementasi tindakan Afirmasi bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIA Semarang (3) bagaimana kendala dan upaya terkait pemenuhan hak reproduksi menyusui warga binaan di Lapas Kelas IIA Semarang. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa (1) terdapat kekosongan hukum mengenai mekanisme dan standar penerapan tindakan afirmasi hak reproduksi bagi warga binaan perempuan; (2) Pemenuhan hak reproduksi menyusui di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang hanya dilakukan berdasarkan hukum positif, sehingga tidak ada tindakan afirmasi yang diterapkan bagi warga binaan perempuan; (3) Pemenuhan hak reproduksi menyusui menemui beberapa kendala dalam sektor regulasi hukum, anggaran, sarana prasarana, dan SDM. Upaya yang dapat dilakukan itu diperlukan pembentukan hukum yang feminis dengan menerapkan *Feminist Legal Theory* sebagai landasannya agar sistem pemasarakatan dapat lebih memperhatikan kerentanan perempuan terutama dalam fungsi reproduksinya. Upaya yang dapat dilakukan adalah percepatan pembentukan hukum, peningkatan layanan, dan penerapan tindakan afirmasi bagi warga binaan perempuan dalam fungsi reproduksinya.

Kata Kunci: Tindakan Afirmasi, Hak Reproduksi Menyusui, Warga Binaan Perempuan, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, *Feminist Legal Theory*.

ABSTRACT

The fulfillment of Reproductive Rights in Indonesia influenced by Patriarchal culture, so the formation of laws is only based on male viewpoints without considering women's perspectives. Law Number 22 Year 2022 on Corrections does not fully accommodate Affirmative Action for female prisoners in their reproductive function. The reproductive right to breastfeeding for female prisoners has not been fulfilled and does not have a special mechanism in its application. The research uses a juridical sociological method. The problems are (1) how the legal politics of affirmative action in the fulfillment of breastfeeding reproductive rights for female prisoners; (2) how the implementation of affirmative action for female prisoners in Class IIA Semarang Correctional Facility (3) how the obstacles and efforts related to fulfilling of breastfeeding reproductive rights of prisoners in Class IIA Semarang Women's Correctional Institution. This study found that (1) there is a legal vacuum regarding the mechanism and standards for the implementation of affirmative action on reproductive rights for female prisoners; (2) The fulfillment of breastfeeding reproductive rights in Class IIA Semarang Women's Correctional Institution only carried out based on positive law, so there is no affirmative action applied to female prisoners; (3) The fulfillment of breastfeeding reproductive rights encounters several obstacles in the sectors of legal regulation, budget, infrastructure, and human resources. Efforts to solve them are formations of feminist law by applying Feminist Legal Theory as the basis so that the correctional system can pay more attention to the vulnerability of women, especially in their reproductive function.

Keywords: *Affirmative Action, Breastfeeding Reproductive Rights, Female Prisoners, Women's Correctional Institution Class IIA Semarang, Feminist Legal Theory.*